

PENGEMBANGAN PERTANIAN PADI SAWAH MASYARAKAT SUKU MARIND DI KABUPATEN MERAUKE

Julius Ary Mollet¹
julius.mollet@gmail.com

Abstrak

Kajian ini merupakan hasil laporan penelitian yang didanai oleh Penelitian Prioritas Nasional MP3EI Tahun 2015 Tahap ke II. Tujuan penelitian : 1) untuk mengkaji pola pengelolaan tanaman padi suku Marind, 2) menganalisa tingkat keuntungan produksi tanaman padi masyarakat Marind. Dengan menggunakan *simple random sampling*, total responden sebanyak 168 orang yang tersebar di tiga distrik (Kurik, Semanggi dan Tanah Miring). Pendekatan kuantitatif dan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terjadi perubahan sistem pertanian suku Marind dari subsisten ke mekanisasi pertanian, serta masyarakat Marind mampu mengembangkan tanaman padi. Selanjutnya hasil analisa BEP, memperlihatkan masyarakat Marind masih memperoleh keuntungan dalam memproduksi padi.

Kata Kunci : Pengembangan Pertanian, Tanaman Padi, Suku Marind.

LATAR BELAKANG

Pengembangan sektor pertanian dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal di *less developed countries* (LCDs) atau negara sedang berkembang telah dikaji oleh peneliti yang tertarik menganalisa mengenai peran *indigenous people* (penduduk asli) dalam proses mekanisasi pertanian. Reyes et al (2009) meneliti mengenai *incorporating regional rice production* di Philipina. Selanjutnya di Ethiopia, Takele (2010) meneliti mengenai *rice profitability and marketing chain*, sedangkan untuk kasus Papua Kouwenhoven (1956) meneliti mengenai peran penduduk asli Papua di Nimboran dalam mekanisasi pertanian.

Krisis pangan telah melanda di beberapa kawasan seperti Afrika, Asia serta Amerika Latin. Ketersediaan pangan merupakan program yang mendesak dalam upaya menghindari kelaparan di kawasan tersebut. Perubahan cuaca yang tidak menentu menyebabkan terjadinya gagal panen komoditas pertanian. Indonesia merupakan negara yang terletak di daerah tropis juga mengalami perubahan iklim yang cukup serius. Sehubungan dengan mengatasi kekurangan stok pangan, pemerintah Indonesia telah mengupayakan membuka lahan baru untuk pertanian di kawasan Timur Indonesia termasuk Provinsi Papua.

Kabupaten Merauke yang terletak di Provinsi Papua sangat potensial dalam pengembangan sektor pertanian. Dengan dicanangkannya program transmigrasi pada awal tahun 1980an di Papua, termasuk

¹ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih.

Kabupaten Merauke, Gubernur Yacob Pattipy memperkenalkan sektor pertanian dengan pendekatan *intensification* yang diadopsi dari Jawa (Mollet, 2011), maka secara perlahan-lahan terjadi perubahan dalam pola tanam masyarakat lokal. Hal ini tentunya membawa dampak yang cukup baik dalam pola pengembangan sektor pertanian di kawasan tersebut, walaupun masih terdapat petani lokal masih menggunakan sistem pertanian yang bersifat tradisional (subsisten).

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Merauke sebesar 56.02% terhadap PDRB, dengan luas wilayah Kabupaten Merauke 4.464.722 ha yang berupa dataran alluvial yang sebagian berawa dan topografi datar dengan jumlah lahan basah dan kering di Merauke mencapai 2.491.822 ha (BPS Kabupaten Merauke, 2014). Berdasarkan potensi lahan pertanian tersebut, maka Kabupaten Merauke ditetapkan sebagai sebagai sentra pertanian nasional di wilayah Papua serta menetapkan sebagai pusat pengembangan pangan dan energi terpadu (MIFEE) atau minapolitan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2011-2014.

Penetapan Kabupaten Merauke sebagai sentra pengembangan padi di Papua yang didasarkan atas kontribusi sektor pertanian (padi) sebesar 73% terhadap total produksi padi di Papua. Sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Papua untuk memantapkan sistem ketahanan pangan (*food security*) dan pengembangan agribisnis, maka upaya pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Merauke akan terus dilakukan.

Terdapat tiga sentra pengembangan padi sawah di Merauke, yaitu Distrik Merauke, Semangga-Tanah Miring dan Kurik (Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Merauke 2003). Curah hujan pada wilayah ini menunjukkan pola monsun (Rouw, 2004), yaitu suatu pola curah hujan dimana terdapat periode kering dan periode hujan. Periode hujan terjadi sekitar Oktober-Maret, sementara April-November dijumpai periode kering. Selanjutnya, makalah ini memaparkan pengembangan sektor pertanian padi sawah oleh penduduk asli Papua (suku Marind).

METODOLOGI PENELITIAN

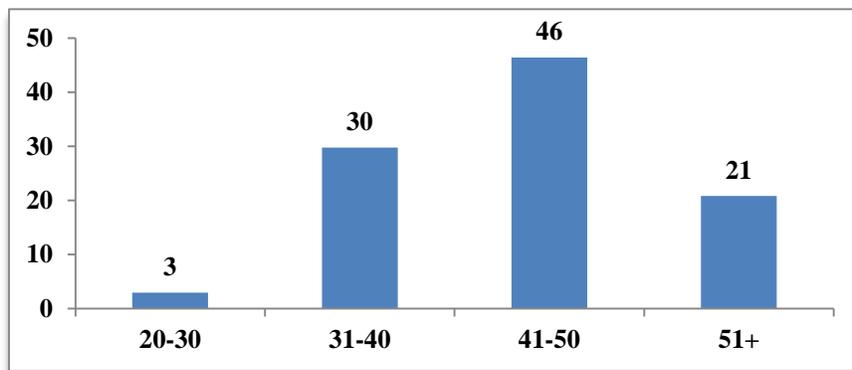
Lokasi penelitian meliputi Kampung Tambat (Distrik Tanah Miring), Kampung Urum (Distrik Semangga) serta Kampung Salor Wapeku Distrik Kurik. Penelitian dilakukan dari bulan Februari-Juli 2015. Masyarakat suku Marind yang bekerja sebagai petani padi sebagai populasi dalam penelitian ini yang mencakup 3 (tiga) kampung yang dapat diuraikan sebagai berikut; jumlah populasi di Kampung Tambat Distrik Tanah Miring sebanyak 296 KK, Kampung Urum Distrik Semangga sebanyak 369 KK dan Kampung Salor Wapeku Distrik Kurik sebanyak 455 KK, maka jumlah populasi 1.120 KK. Penetapan responden sebesar 15% dengan menggunakan *simple random sampling* dari total responden menjadi 168

KK. Selanjutnya untuk memperoleh jawaban yang telah ditetapkan dalam pembahasan menggunakan pendekatan statistik deskriptif dan *break event point analysis*.

HASIL PENELITIAN

Sebaran responden berdasarkan kelompok umur, seperti pada Grafik 1., memperlihatkan bahwa terdapat 46 persen responden yang berumur 41-50 tahun dan selanjutnya dikikuti oleh responden yang berumur 31-40 tahun sebesar 30 persen. Atau dengan kata lain distribusi respondent suku Marind didominasi oleh usia produktif (*prime ages*). Sedangkan usia muda (20-30) dan usia tua (51+) mencapai 3 persen dan 21 percent.

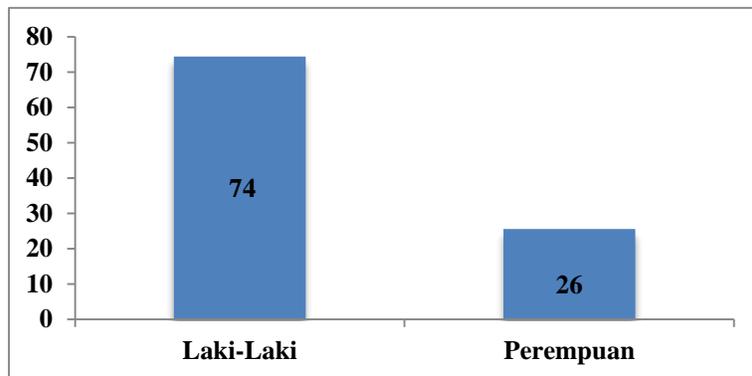
Grafik 1.
Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur (N=168)



Sumber : Data Primer diolah, 2015.

Grafik 2., memperlihatkan distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dimana mayoritas petani padi Suku Marind dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki sebesar 74 persen dan perempuan sebanyak 26 persen.

Grafik 2.
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin (N=168)



Sumber : Data Primer diolah, 2015.

Responden berdasarkan latar belakang pendidikan seperti pada Grafik 3, menunjukkan bahwa responden dengan pendidikan SMP mencapai 39 persen dan responden dengan pendidikan SMA mencapai 33 persen. Sedangkan responden dengan pendidikan diploma hanya sebanyak 5 persen.

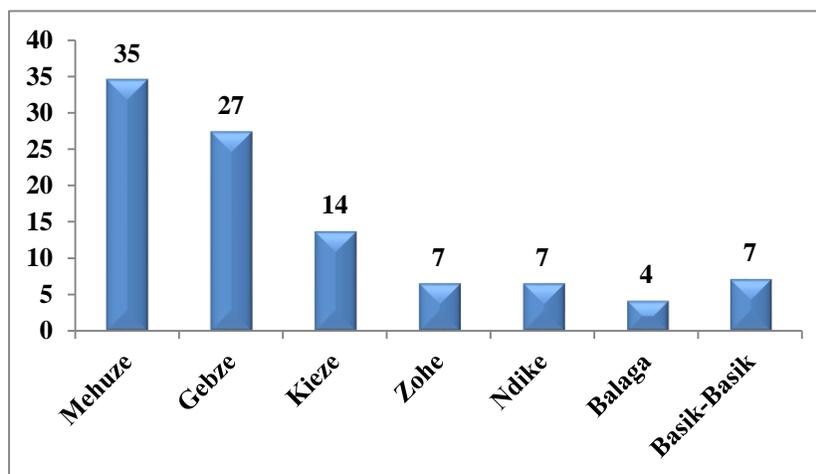
Grafik 3.
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan (N=168)



Sumber : Data Primer diolah, 2015.

Suku Marind terdiri dari berbagai marga (clain), Grafik 4 memperlihatkan responden berdasarkan marga dimana marga Mehuze sebanyak 35 persen, diikuti oleh marga Gebze (27 persen) serta Keize (14 persen). Disisi lain terdapat marga Suku Marind dalam responden ini dibawah 10 persen seperti Zohe, Ndiken, Balagi, dan Basik-basik.

Grafik 4.
Distribusi Responden Berdasarkan Marga (N=168)



Sumber : Data Primer diolah, 2015.

Pengembangan Tanaman Padi Masyarakat Suku Marind

Program transmigrasi telah membawa perubahan dalam pola tanam penduduk suku Marind. Dan tentunya hal ini akan membawa perubahan dalam tehnik bercocokl tanam dari yang bersifat tradisional ke mekanisasi pertanian. Menurut Kepala Disrtik Semanggi mengemukakan bahwa *awalnya suku Marind kesehariannya mata pencaharian adalah berburu dan bercocok tanam di kebun dan berpindah-pindah, namun setelah diperkenalkan dengan tanaman padi, masyarkat Marind belajar dari para trasnmigran dari Jawa* (Hasil wawancara 11 Juni 2015). Memang tidak mudah merubah pola bercocok tanam masyarakat suku Marind membutuhkan ketelatenan dan waktu.

Gambar 1.
Perubahan Bercocok Tanam Masyarakat Suku Marind pada Tanaman Padi



Sumber : Data Hasil Studi Lapangan, 2015.

Gambar 1 memperlihatkan cara bercocok tanam yang dimiliki oleh suku Marind telah banyak perubahan dan sudah hampir menyamai dengan cara bercocok tanam oleh masyarakat transmigrasi, dan dalam kehidupan masyarakat telah terjadi perubahan yang sangat signifikan yang dulunya sebagai masyarakat peramu dan sistem berladang berpindah-pindah menjadi masyarakat petani yang menetap dan menerapkan sistem pertanian yang benar. Sehingga dapat dikatakan telah terjadi hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi hubungan antara masyarakat asli dengan masyarakat pendatang.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa, sistem pertanian padi yang diterapkan oleh masyarakat petani di Merauke terdapat 2 (dua) musim yakni musim basah yakni bulan Oktober-Desember sebagai waktu untuk menanam padi sedangkan musim kering terjadi bulan April-Juni. Pada musim basah maka masyarakat berdasarkan kelompok atau marga mulai menanam padi pada bulan Oktober yang diharapkan akan panen pada bulan Januari dan awal bulan Februari, berdasarkan hasil wawancara maka para petani bahwa mulai pembibitan sampai dengan masa panen harus melalui musyawarah seluruh anggota masyarakat yang juga merupakan termasuk sebagai anggota kelompok tani bersama tenaga PPL serta pemerintah setempat.

Menurut pengalaman responden sejauh ini petani suku Marind hanya mampu melakukan sistem cocok tanam selama dua kali musim tanam yakni tanam pada musim hujan dan musim kemarau (gadoan). Pengalaman masyarakat apabila mereka melakukan pertanian yang baik dan selalu melakukan perawatan padi sampai masa panen maka biasanya lahan seluas satu hektar akan dapat menghasilkan sebanyak 5-10 ton gabah. Sedangkan pada musim tanam gadoan (bahasa jawa) artinya musim tanam kemarau/kering yang berlangsung mulai bulan April-Juli, maka para petani sebagian besar tidak bercocok tanam karena pada umumnya hasilnya sangat kurang yakni tidak lebih dari 2 ton padi dan cenderung merugi.

Pada masa panen secara umum di Distrik Tanah Miring dan Distrik Semangga masyarakat menggunakan sabit dan mengundang keluarga lainnya untuk membantu panen dengan sistem bayaran per hari, akan tetapi di Distrik Kurik masyarakat sudah mulai menggunakan mesin potong padi yang sudah modern sehingga masyarakat hanya tinggal mengambil hasilnya dalam karung seperti yang terlihat dalam gambar berikut ini :

Gambar 2.
Mesin Pemotong Padi yang Digunakan Setelah Masa Panen



Sumber : Data Hasil Studi Lapangan, 2015.

Setelah panen raya masyarakat biasanya melakukan penjemuran gabah sampai kering dan selanjutnya dibawa ke tempat penggilingan padi dengan menggunakan taksi sebutan di Papua untuk angkutan umum. Selama ini masyarakat suku Marind tidak pernah menjual hasil panen dalam bentuk gabah akan tetapi berbentuk beras yakni di tempat penggilingan tersebut. Alasan melakukan sistem tersebut disebabkan masalah ketersediaan transportasi angkutan kota reguler yang sangat jarang dan bahkan tidak ada. Besaran biaya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni sebesar 10% diberikan kepada pengusaha penggilingan dari jumlah beras yang digiling.

Profitabiliti Produksi Padi Masyarakat Marind

Sistem usaha tani padi yang dilakukan oleh masyarakat suku Marind sampai sejauh ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat dikembangkan maupun dimaksimalkan pemanfaatannya. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor internal dimana masih terbukanya kesempatan

untuk memotivasi maupun meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat lokal untuk menerapkan sistem cocok tanam yang lebih baik lagi, faktor eksternal yakni masih belum maksimalnya pemanfaatan lahan oleh masyarakat serta adanya berbagai program pencetakan lahan/sawah baru serta program lainnya yang bertujuan untuk memajukan pertanian masyarakat oleh pemerintah.

Sebelum bibit dihamburkan maupun ditanami, maka biasanya petani mempersiapkan lahan, berdasarkan informasi dari responden pada umumnya petani menggunakan traktor tangan untuk membajak sawah. Rata-rata biaya sewa traktor per hektar yakni sebesar Rp.1 juta dengan lama waktu 2 hari kerja yang dikemudikan oleh petani tersebut. Akan tetapi untuk beberapa kampung masyarakat juga diberikan bantuan traktor oleh pemerintah, sehingga pengelolaannya oleh kepala kampung dan masyarakat kampung tersebut sudah bisa melakukan perawatan, perbaikan dan penggantian suku cadang yang rusak. Seperti yang terdapat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 3. Penggunaan Mesin Traktor Untuk Membajak Sawah Petani



Sumber : Data Hasil Studi Lapangan, 2015.

Setelah lahan ditanami, maka waktu untuk sampai masa panen pada umumnya selama 90 hari atau (3 bulan), akan tetapi sebelum masa panen dalam masa pertumbuhan padi harus dilakukan perawatan yakni membersihkan lahan dari ilalang maupun tanaman lainnya, dilanjutkan dengan pemberian pupuk selam 2x yakni pada awal penanam padi dan sebelum padi berbuah. Selain itu dalam perkembangan secara umum sawah masyarakat diserang oleh hama/wereng baik berupa keong mas, ulat, tikus dan burung, semua hama tersebut harus diatasi dan dibasmi. Untuk membasmi hama tersebut biasanya petani berkonsultasi dengan PPL ataupun ketua Gapoktan tentang jumlah dan ukuran racun yang akan dipakai. Untuk aktivitas merawat dan membersihkan tanaman padi selain menggunakan tenaga kerja keluarga, biasanya masyarakat juga saling bergotong royong.

Pengalaman petani selama bercocok tanam sangat terbantu dengan keberadaan tenaga petugas penyuluh lapangan (PPL). PPL merupakan perpanjangan tangan dinas pertanian dan tanaman pangan

Kabupaten Merauke untuk memberikan informasi tentang sistem cocok tanam yang baik, memberikan solusi permasalahan cocok tanam yang dialami oleh petani sampai dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan sistem pertanian secara luas.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa luas lahan responden berkisar $\pm 0,5-5$ ha. Keberadaan tanah tersebut merupakan warisan dari nenek moyang mereka, akan tetapi karena program MIFEE, maka hampir seluruhnya tanah masyarakat di wilayah Distrik Semangga dan beberapa distrik lainnya sudah dikuasai oleh pengusaha. Sedangkan di Distrik Tanah Miring dan Distrik Kurik yang masih dimiliki oleh masyarakat setempat.

Pernyataan petani menyebutkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang sering dialami oleh para petani yakni penggunaan bibit yang kurang baik, masalah hama wereng (ulat, walang sangit, keong emas, tikus), sistem irigasi yang tidak berjalan dengan baik, harga pupuk yang sangat mahal dan terkadang tidak tersedia, masalah burung mengganggu tanaman padi pada saat sudah berbulir dan menjelang panen, kandungan protein tanah/lahan pertanian sangat rendah, masalah kekurangan modal petani untuk membeli pupuk, pembasmi hama serta masalah kekurangan tenaga kerja.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan responden menunjukkan bahwa para responden pada umumnya menggunakan bibit hasil buatan sendiri yang disisihkan pada setiap musim tanam. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan sistem tersebut, kelebihan yakni para petani dapat mengetahui secara jelas kondisi bibit yang digunakan sehingga memberikan kejelasan terhadap petani tentang bibit yang akan digunakan pada musim tanam berikutnya, sedangkan kekurangannya yakni petani tidak dapat menggunakan bibit lain yang kemungkinannya hasil panen dan harga dari varietas bibit baru tersebut lebih tinggi dibandingkan bibit yang ada.

Rata-rata pengeluaran para responden untuk menyediakan bibit yakni sebesar Rp.174.436, sedangkan jumlah pengeluaran yang paling tertinggi yakni sebesar Rp.245.000 dengan jumlah minimum yakni mencapai Rp.68.000. Jumlah pengeluaran tersebut dipergunakan untuk membeli bibit baru dengan varietas yang sama ataupun bibit yang dibuat oleh petani sendiri dengan mengkalkulasi harga padi per liter maupun per kilogram.

Biaya pengeluaran petani (responden) untuk membeli pupuk Urea, SP 36, KCL, NPK yakni dengan rata-rata sebesar Rp.724.850 dimana pengeluaran pupuk tertinggi yakni NPK Rp.345.000 dan terendah sebesar Rp.115.000 diikuti pupuk Urea pengeluaran tertinggi yakni Rp.270.000 dan terendah sebesar Rp.180.000 serta terendah yakni pupuk KCL dengan total pengeluaran tertinggi Rp.140.000 dengan terendah sebesar Rp.70.000.

Disamping menggunakan pupuk, petani juga menggunakan pestisida dengan berkisar antara 3-12 botol disesuaikan dengan luas lahan yang akan ditanami. Sedangkan apabila dikonversi ke rupiah yakni jumlah pengeluaran berkisar antara Rp.360.000 -Rp.1.440.000.

Jenis tenaga kerja yang terdapat di wilayah penelitian yakni antara tenaga kerja keluarga sendiri (ayah, ibu, anak, keponakan dan lainnya) sedangkan untuk kegiatan seperti cocok tanam biasanya petani yang memiliki lahan yang luas mereka menggunakan tenaga kerja 1-5 orang sampai dengan selesai ditanami, sedangkan pada aktivitas penyiangan juga demikian sampai dengan panen juga para petani tersebut menggunakan tenaga kerja bayaran per hari dengan biaya sebesar Rp.150.000/orang/kotor atau apabila makan, minum, rokok dan jajanan lainnya ditanggung oleh petani maka biaya bersihnya dibayar terhadap tenaga kerja bayaran tersebut mencapai Rp.100.000/orang/hari.

Dengan demikian biaya TK yang harus ditanggung oleh para petani apabila menggunakan TK untuk melaksanakan aktivitas tersebut di atas yakni tertinggi mencapai Rp.1200.000 dan terendah yakni Rp.600.000 dengan tingkat rata-rata pengeluaran sebesar Rp.886.227. pada tabel berikut ini terdapat informasi lengkap tentang usaha tani :

Tabel 1.
Hasil Analisis *Descriptives Statistics*

	N	Minimum	Maximum	Mean
Bibit	168	68.000,00	245.000,00	174.436,5269
Urea	168	180.000,00	270.000,00	223.383,2335
SP 36	168	100.000,00	200.000,00	134.431,1377
KCL	168	70.000,00	140.000,00	112.335,3293
NPK	168	115.000,00	345.000,00	254.700,5988
Pupuk	168	522.500,00	955.000,00	724.850,2994
Pestisida	168	360.000,00	1.440.000,00	875.209,5808
TK	168	600.000,00	1.200.000,00	886.227,5449
Irigasi	168	150.000,00	225.000,00	184.431,1617
Traktor	168	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00
Mesin Pemetong Padi	168	1.500.000	2.000.000	1.724.550,90
Sewa Lahan	168	1.000.000	1.500.000	1.236.526,95
Transportasi dan penggilingan	168	1.020.000	3.360.000	2.250.647
Jlh Biaya	168	6.335.000	16.915.500	11.259.000,03
Hasil Produksi	168	60,00	80,00	68,2831
Harga Beras	168	6.000,00	6.500,00	6.485,0299
Pendapatan	168	10.200.000,00	33.600.000,00	22.506.467,0659
Laba	168	2.845.000,00	13.324.500,00	11.247.467,00

Sumber : Data Primer Diolah, 2015.

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan bahwa biaya irigasi yang dikeluarkan oleh responden untuk menjaga tetap terairnya lahan pertanian masyarakat yakni dengan mengeluarkan sejumlah uang berkisar antara Rp.150.000-Rp.225.000 yakni sebagai uang iuran warga untuk membantu manajemen pengairan pada lahan-lahan tertentu yang memiliki sistem pengairan yang sudah baik dan tidak tergantung dengan air hujan.

Biaya penggilingan padi dan transportasi adalah satu kesatuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni pihak pemilik angkutan dan sekaligus pemilik mesin penggilingan padi dengan para petani. Biaya penggilingan dan pengangkutan tersebut yakni berkisar 10% dari seluruh jumlah hasil panen padi yang telah digiling menjadi beras.

Jumlah biaya produksi beras setiap musim tanam yakni berkisar antara Rp.6.335.000-Rp.16.915.500, sedangkan rata-rata biaya produksi yakni sebesar Rp. 11.259.000. Jumlah tersebut sangat besar yang disebabkan oleh minimnya fasilitas pertanian yang dimiliki oleh petani sehingga ikut berkontribusi terhadap peningkatan biaya pertanian padi masyarakat setempat.

Sedangkan hasil produksi gabah kering giling petani setiap musim tanam yakni berkisar antara 60-80 sak gabah. Jumlah satu sak yakni berkisar antara 60-65 kg padi atau gabah kering, jika dilakukan konversi terhadap beras maka akan mengalami penyusutan sebesar 20-30% dari setiap karung sak. Dengan demikian jumlah pendapatan petani pribumi setiap musim tanam yakni berkisar antara Rp.10.200.000-Rp.33.600.000. selanjutnya jumlah laba bersih setiap musim tanam padi yakni berkisar antara Rp.2.845.000-Rp.13.324.500.

Selanjutnya akan dijelaskan tentang Break Even Poin (BEP) pengelolaan padi oleh para responden di 3 distrik penelitian (Distrik Kurik, Tanah Miring, dan Distrik Semangga) yakni terdiri dari :

BEP Unit :

$$BEP Unit = \frac{FC}{P - AVC}$$

FC = Biaya Tetap dari TK, Irigasi, Transportasi dan Penggilingan, Traktor, Mesin Penggilingan Padi, Sewa Lahan, dan Pestisida.

AVC = Biaya Tidak Tetap dari Bibit, Pupuk, Pestisida

P = Harga jual beras

$$BEP Unit = \frac{9.612.239}{6.485 - 5.524}$$

$$BEP Unit = 10.001$$

BEP unit yang dihasilkan sebesar 10.001 artinya jika petani mencapai titik keseimbangan ketika petani mampu menjual beras dengan harga 10.001 kg, sedangkan kenyataannya bahwa harga jual beras ke penjual beras atau dalam kasus di wilayah Merauke yakni pengusaha penggilingan yang menjadi penjual beras hanya membeli beras petani dengan harga Rp.6.000/kg.

Sedangkan BEP harga beras pertanian di Merauke yakni mencapai :

$$BEP Hasil = \frac{FC}{1 - Sales Price/VC}$$

FC = Biaya tetap dari TK, Irigasi, Transportasi dan Penggilingan, Traktor, Mesin
 Penggilingan Padi, Sewa Lahan, dan Pestisida.
 VC = Biaya Tidak Tetap dari Bibit, Pupuk, Pestisida
 Sales Price = Harga jual beras.

$$BEP \text{ Hasil} = \frac{9.612.239}{1 - 11.057.292/5.524}$$

$$BEP \text{ Hasil} = 9.617.039$$

BEP Hasil yang dihasilkan sebesar 9.617.039 artinya jika petani mencapai titik keseimbangan ketika petani mendapatkan penghasilan minimal sebesar Rp 9.617.039,- bila dibandingkan dengan tabel di atas maka BEP hasil pertanian padi oleh para responden secara umum masih menguntungkan karena jumlah pendapatan petani mulai dari Rp.10.200.000-Rp.33.600.000.

Berdasarkan analisis tersebut memberikan gambaran bahwa usaha tani padi yang dilaksanakan oleh responden selama ini masih menguntungkan walaupun tingkat keuntungannya untuk beberapa responden sangat minim, selain itu agar tingkat keuntungan usaha tani semakin meningkat dapat dilakukan dengan melakukan efisiensi biaya produksi serta menekan biaya-biaya yang tidak penting lainnya.

KESIMPULAN

Karakteristik responden memperlihatkan bahwa kelompok umur responden didominasi oleh kelompok umur 41-50 tahun, dimana mayoritas responden adalah laki-laki, dengan rata-rata pendidikan responden SMP. Marga keluarga Mehuze, Gebze dan Keize merupakan tiga urutan marga terbesar dalam penelitian ini. Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses pengelolaan sistem pertanian masyarakat Marind telah berubah sejak program transmigrasi masuk ke Merauke. Masyarakat Marind dengan pola pertanian subsisten telah beralih kemekanisasi pertanian padi sawah. Walaupun pengembangan tanaman padi sawah di Merauke mengalami persaingan dari beras yang didatangkan dari luar Merauke, masyarakat Marind masih memperoleh keuntungan dalam memproduksi padi.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Merauke (2014), "*Kabupaten Merauke Dalam Angka 2014*". BPS. Merauke.
 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merauke dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua (2003), "*Pewilayahan Komoditas Pertanian Berdasarkan Zona Agroekologi Kabupaten Merauke, Provinsi Papua*" Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merauke dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua. Merauke.
 Kouwenhoven, W.J.H. (1956) "*A Study of Social Change and Social-economic and Development in a New Guinea Society*" Dissertaion Leiden Universty, The Netherlands.
 Mollet, J.A (2011) "*The Dynamics of Contemporary Local-government Policies and Economic Development in West Papua*", *Development in Practice Journal* , 21: 2, 232-243, UK, England.
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2011 *Tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2011-2014*. Jakarta.

- Reyest et all (2009) *“Incorporating Regional Rice Production Models in Rice Importation Simulation Model: A Stochastic Programming Approach”* Philippine Institute for Development Studies, Philipine.
- Rouw, A. (2004) *“Tingkat kerawanan zona agroekologi tanaman pangan terhadap kekeringan dan banjir: Studi kasus Kabupaten Merauke”*, Papua. Tesis Magister Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor (Tidak dipublikasikan).
- Takele, A (2010) *“ Analysis of Rice Profitability and Marketing Chain: The Case of Fogera Woreda, South Gonder Zone, Amhara National Regional State, Ethiopia”* unpublished thesis, School of Graduates Studies, Haramaya University.